

## KEBANGKITAN PEREMPUAN JAWA TENGAH: GERAKAN WANITA SEJAHTERA DALAM KACAMATA *STRATEGIC TRIANGLE MODEL*

Rifka Nafilatun Nafichah<sup>1\*</sup>, Hamidah Kurniawati<sup>2</sup>, Mukhasanah<sup>3</sup>, Tri Yuniningsih<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas FISIP Universitas Diponegoro

Email: rifkanafichah@students.undip.ac.id<sup>1\*</sup>, hamidahkurniawati@students.undip.ac.id<sup>2</sup>, mukhasanah@students.undip.ac.id<sup>3</sup>

\*corresponding author

### **Abstract**

*Women's roles remain marginalized in the national leadership arena. This is clearly evident in the significantly lower proportion of women than men in strategic positions in Indonesia, particularly in business and government. To champion the inclusivity of women in strategic roles, the Prosperous Women's Movement (GWS) is actively operating, including in Central Java. The purpose of this study is to analyze the public value of the Prosperous Women's Movement for the advancement of Central Javanese women in both politics and economics. The research was conducted using secondary data exploration and analysis criteria using Moore's (1995) triangle strategic model. The results indicate that the public value of the Central Java GWS is felt more in the economic sector than in the political sector. Therefore, the GWS is expected to increase the training of female cadres and establish an incubator for female politicians in Central Java.*

**Keywords:** Prosperous Women's Movement, Public Value, Women

### **Abstrak**

Peran perempuan masih termarginal dalam arena kepemimpinan nasional. Hal ini secara jelas dilihat dari proporsi peran perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam posisi strategis di Indonesia, khususnya dalam bisnis dan pemerintahan. Dalam rangka memperjuangkan inklusifitas perempuan dalam peran-peran strategis, terdapat Organisasi Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) yang beroperasi aktif salah satunya di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *public value* dari Gerakan Wanita Sejahtera untuk kebangkitan perempuan Jawa Tengah baik dalam politik dan ekonomi. Penelitian dilakukan dengan eksplorasi data sekunder dengan kriteria analisis menggunakan *triangle strategic model* oleh Moore (1995). Hasil menunjukkan bahwa nilai kepublikan dari GWS Jateng lebih dirasakan pada sektor ekonomi dibandingkan sektor politik. Oleh karena itu GWS diharapkan untuk meningkatkan pelatihan kader perempuan dan membangun inkubator politisi perempuan Jawa Tengah.

**Kata kunci:** Gerakan Wanita Sejahtera, *Public Value*, Perempuan

### **Pendahuluan**

Gerakan Wanita Sejahtera di Jawa Tengah dapat dianggap sebagai bagian dari usaha untuk memberdayakan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender yang lebih luas dan memperkuat hak-hak wanita. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi kerangka kerja utama yang telah diakui secara luas dalam inisiatif pembangunan baik internasional maupun lokal (Sen & Mukherjee, 2014). Pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya (Moghadam & Senftova, 2005).

Seperti dalam amanah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan menjadi isu gender penting dalam penyusunan perencanaan dan anggaran daerah. Tingkat kemajuan dan kesenjangan gender di Jawa Tengah dapat dibaca melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Data BPS menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024, IKG mengalami penurunan dari 0,371 menjadi 0,308, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam mengurangi ketimpangan gender. IPG juga meningkat dari 92,83 menjadi 93,00, hal ini menandakan semakin setaranya akses perempuan terhadap capaian pembangunan. Namun demikian, IDG justru menurun dari 74,18 pada tahun 2023 menjadi 72,58 pada 2024, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam aspek pemberdayaan, terutama keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

**Tabel 1. IKG, IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah (2022-2024)**

Uraian	2022	2023	2024
IKG	0,371	0,336	0,308
IPG	92,83	92,87	93,00
IDG	73,78	74,18	72,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pemberdayaan perempuan masih menghadapi banyak tantangan, seperti dalam sektor pertanian dan koperasi, peran perempuan seringkali tidak sepenuhnya diakui, dan ada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota, tanpa memandang jenis kelamin mereka (Wijers, 2019). Menghadapi tantangan tersebut, pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri perempuan, sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat serta dalam pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga dan komunitas (Engida, 2021).

Inisiatif seperti Gerakan Wanita Sejahtera juga harus mempertimbangkan aspek kelembagaan dan kebijakan yang menghambat kesetaraan gender. Guna memastikan keberhasilan gerakan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Cornwall & Rivas, 2015; Sen & Mukherjee, 2014). Pada titik ini, konsep nilai publik menjadi relevan karena menekankan bahwa sebuah gerakan atau kebijakan publik dinilai berhasil apabila mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, memperoleh legitimasi publik, dan ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Dengan memproduksi nilai sosial, ekonomi, dan politik bagi perempuan, Gerakan Wanita Sejahtera dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial yang lebih luas, sekaligus memperkuat tata kelola yang inklusif. Dengan demikian, sepak terjang Gerakan Wanita Sejahtera di Jawa Tengah dapat dianalisis manfaatnya melalui kerangka nilai kepublikan, terutama dalam melihat sejauh mana gerakan ini menghasilkan dampak kolektif yang berkelanjutan bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

### **Tinjauan Pustaka** ***Kesetaraan Gender***

Kesetaraan gender secara teoritis merujuk pada pandangan bahwa semua individu, tanpa memandang identitas gender, harus memiliki hak dan kesempatan yang sama pada semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Teori ini menekankan

pentingnya menghilangkan stereotip dan diskriminasi berbasis gender yang dapat membatasi individu dalam mencapai potensi penuh mereka. Teori feminis menegaskan bahwa kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan hak, tetapi juga dengan pemberdayaan perempuan untuk mengakses sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Benería, 2022). Dalam teori ini, kesetaraan bukan hanya tentang memberikan peluang yang sama, tetapi juga memperhatikan ketidaksetaraan yang ada dan melakukan intervensi untuk mencapainya. Penerapan teori kesetaraan gender sering dihadapkan pada tantangan struktural dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Beberapa teori mengusulkan pentingnya perubahan sosial yang lebih dalam, seperti perubahan dalam struktur keluarga, pekerjaan, dan kebijakan publik, agar kesetaraan gender dapat tercapai secara menyeluruh. Sebagai contoh, teori keadilan sosial berpendapat bahwa kesetaraan gender harus mencakup redistribusi kekuasaan dan sumber daya yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, serta pemecahan masalah ketidaksetaraan yang bersifat interseksional (misalnya, gender, kelas sosial, ras, dll.) (Crenshaw, 2023). Pendekatan ini tidak hanya mengukur kesetaraan berdasarkan peluang, tetapi juga hasil akhir yang setara bagi semua individu.

### ***Pemberdayaan Perempuan***

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar mengarah pada kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 1996). terdahulu mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Pemberdayaan adalah transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada empat tingkatan yang berbeda, yaitu keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Status perempuan hanya akan meningkat ketika perempuan dapat mandiri dan dapat mengontrol keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiah, 2010). Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensinya sehingga dapat lebih mandiri dan bekerja. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada refleksi kebutuhan perempuan akan kemandirian, agar pertumbuhannya dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan. Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai pencerminan kepentingan emansipasi yang mendorong setiap orang untuk berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zakiah, 2010).

### ***Nilai Publik***

Nilai publik adalah suatu filosofi manajemen publik di mana para manajer publik harus berpikir dan bertindak secara strategis untuk menciptakan nilai publik, dan keberhasilan diukur dari kemampuan tersebut. Prinsip dasar nilai publik adalah membimbing operasi organisasi publik untuk mencapai tujuan fundamentalnya, yaitu menciptakan nilai bagi warga negara melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas (Moore, 1995; Try dan Radnor, 2007; Meynhardt, 2009). Nilai publik memiliki kemampuan untuk mengkaji kinerja layanan publik dari sudut pandang warga negara, dan karena kualitas inilah konsep nilai publik menjadi sangat populer di negara maju bahkan negara berkembang untuk mengevaluasi kinerja layanan publik (Kelly et al., 2002; Benington, 2009; Alford dan O'Flynn, 2009).

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis nilai publik GWS dalam pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk menganalisis nilai publik GWS dalam pemberdayaan perempuan sektor politik di Jawa Tengah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, artikel, laporan dan publikasi lain yang terpercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kriteria analisis dari teori *public value* menurut Moore (1995). Sasaran penelitian ini adalah Organisasi Gerakan Wanita Sejahtera di Jawa Tengah. Hasil analisis public value ini akan menjadi landasan untuk penarikan kesimpulan berupa dampak Organisasi GWS dalam mendorong kebangkitan perempuan di Jawa Tengah

### **Hasil**

#### ***Gambaran Umum Gerakan Wanita Sejahtera (GWS)***

Organisasi Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) berkeinginan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang mandiri secara ekonomi. Hal itu sebagai bentuk dukungan atas program Presiden RI, Asta Cita nomor 6 tentang pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (Jateng Gayeng News, 2025). Langkah ini menunjukkan bahwa arah program GWS berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi perempuan dan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional.

Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) se-Jawa Tengah menggelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan tema "Bangkit Bersama: Perempuan Berdaya, UMKM Sejahtera." Acara ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus refleksi atas kiprah tiga tahun perjalanan GWS dalam memperkuat peran perempuan di tengah tantangan ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas daerah untuk memperkuat jaringan usaha dan solidaritas antaranggota. Pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan pelatihan keterampilan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembentukan mental wirausaha dan kesadaran kolektif.

Hasil rapat pleno menghasilkan rekomendasi strategis, di antaranya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, membuka akses pelatihan digital marketing, dan memperluas jaringan UMKM binaan berbasis komunitas perempuan. (BerlilianMedia.Com, 2025). Rekomendasi ini memperlihatkan bahwa inisiatif GWS mencakup peningkatan keterampilan digital, perluasan jejaring usaha, serta optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah.

Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) sendiri merupakan organisasi masyarakat yang beranggotakan para wanita dari berbagai golongan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Memanfaatkan SDM yang ada dan juga meningkatkan kinerjanya dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan perempuan dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Gerakan ini menjadi bukti di tengah masyarakat bahwa perempuan juga bisa mandiri dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). (Islamiyah, Siti, 2022). Pernyataan ini menegaskan bahwa program GWS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan nilai kemandirian, pemberdayaan, dan pembangunan ekonomi komunitas.

#### ***Gerakan Wanita Sejahtera di Wilayah Jawa Tengah***

Kehadiran Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Jawa Tengah diharapkan dapat memberdayakan keberadaan koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Banyak koperasi dan UMKM perempuan yang berada di provinsi ini yang bisa diberdayakan. Program koperasi yang dijalankan kaum perempuan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah

secara cepat. (Suara Merdeka, 2024). Informasi ini menggambarkan bahwa sasaran dan cakupan gerak GWS cukup luas, meliputi koperasi perempuan dan UMKM di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Rapat Pleno DPW dan DPC GWS se-Jawa Tengah menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki struktur yang kuat dari tingkat wilayah hingga cabang. Kegiatan lintas daerah tersebut menjadi bukti bahwa jaringan GWS mencakup banyak kabupaten/kota, melibatkan anggota perempuan dari berbagai komunitas, serta memperluas jangkauan pendampingan ekonomi berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, jangkauan dan cakupan operasi GWS semakin meluas melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, pembinaan UMKM perempuan, penguatan koperasi, serta pelatihan lintas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa GWS berperan sebagai penggerak pemberdayaan perempuan yang merentang dari level komunitas hingga tingkat regional, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

### ***Pemberdayaan Politik GWS***

Hasil pemberdayaan politik melalui Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) dapat ditinjau dari kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan serta perubahan representasi perempuan dalam pemerintahan daerah. GWS secara konsisten menyelenggarakan rapat pleno DPW/DPC, gebyar kegiatan pemberdayaan, serta audiensi dengan pejabat daerah seperti Bupati dan Gubernur, di samping mendorong penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi perempuan di berbagai kabupaten/kota. Aktivitas-aktivitas ini terdokumentasi dalam situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, data publik daerah ([jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id)), dan pemberitaan lokal.

Selain itu, publikasi media sosial GWS Jateng menunjukkan aktivitas politis yang aktif. Terdapat publikasi yang menyorot kegiatan pleno dan audiensi antara GWS dengan pemerintah daerah setempat, seperti audiensi GWS dengan Gubernur dan Bupati yang tercatat dalam laman resmi menunjukkan adanya ruang interaksi yang potensial bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam arena politik lokal. Hal ini tampak membuka akses bagi perempuan terhadap jaringan politik lokal yang strategis, terutama dalam mendorong munculnya calon perempuan maupun memperkuat advokasi kebijakan.

Meskipun demikian, data BPS menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam parlemen di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 17,65 persen, sebuah indikator representasi politik yang penting namun belum secara langsung dapat disahkan sebagai hasil dari intervensi GWS. Temuan ini mengindikasikan bahwa GWS di Jawa Tengah telah aktif dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi partisipasi politik perempuan namun belum terbukti meningkatkan partisipasi perempuan dalam panggung politik Jawa Tengah.

### ***Pemberdayaan Ekonomi GWS Jateng***

Komitmen Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Jawa Tengah terhadap peningkatan peluang ekonomi perempuan terlihat dari berbagai inisiatif yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Dalam rapat pleno DPW dan DPC GWS Jawa Tengah bertema "Bangkit Bersama: Perempuan Berdaya, UMKM Sejahtera", Ketua DPW GWS Jateng, Dr. Hj. Dina Ali Hanafia, menegaskan bahwa gerakan ini mendorong perempuan untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan pemahaman tentang nilai jual produk, strategi pemasaran, serta peningkatan kualitas produksi (Hidayat T, 2025, [Berlianmedia.com](http://Berlianmedia.com)). Upaya ini juga tercermin pada GWS Kota Salatiga, yang menurut laporan Suara Merdeka, secara aktif mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM perempuan, antara lain melalui pelatihan keterampilan usaha,

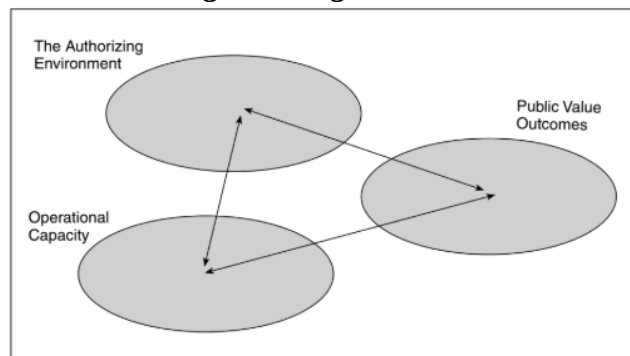
fasilitasi akses pemasaran, serta pendampingan untuk penguatan kapasitas bisnis (Yuli S, 2025, [Suaramerdeka.com](http://Suaramerdeka.com)).

Sementara itu pada tataran kebijakan, Ketua Umum DPP GWS, Giwo Rubianto Wiyogo, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah alokasi anggaran khusus untuk program perempuan. Dorongan terhadap "anggaran perempuan" ini menunjukkan bahwa GWS tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga pada penguatan struktur pendukung agar program pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan (Fardianto F, 2023, IDN Times Jateng).

Komitmen pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dikuatkan dengan kolaborasi antara GWS dengan BKOW (Badan Kerja Sama Organisasi Wanita) Jateng. Kolaborasi ini semakin memperluas dampak pemberdayaan, mengingat BKOW sendiri menempatkan isu ekonomi perempuan sebagai isu strategis dengan program pelatihan ekonomi, pembukaan peluang usaha, serta pendampingan bagi perempuan dari keluarga miskin (Jatengprov.go.id, 2025). Dengan demikian melalui berbagai intervensi ini, menunjukkan bahwa GWS Jateng berperan signifikan dalam memperluas peluang ekonomi perempuan melalui pendekatan pemberdayaan, advokasi kebijakan, dan kolaborasi kelembagaan.

## Pembahasan

### *Gerakan Wanita Sejahtera dalam Triagle Strategic Model*



**Gambar 1. *The strategic triagle of public value***

Sumber: Bennington, J., & Moore, M. (2010)

Pada gambar di atas terdapat model yang dapat digunakan untuk menganalisis nilai kepublikan yaitu melalui *Strategic Triangle* menurut Moore (1995), model ini menekankan tiga pilar kritis dalam menciptakan nilai publik, diantaranya adalah: a) Legitimasi & Dukungan (*The Authorizing Environment*), b) Kemampuan Operasional (*Operational Capacity*), dan c) Nilai Publik (*Public value Outcome*). Berdasarkan konteks Gerakan Wanita Sejahtera di Jawa Tengah, berikut ini adalah analisisnya nilai kepublikannya:

#### 1) Legitimasi & Dukungan

Legitimasi merujuk pada penerimaan politik dan hukum, sementara dukungan mencakup partisipasi dan kepercayaan *stakeholders*. GWS memiliki legitimasi sosial yang kuat melalui keberadaan struktur organisasi dari tingkat wilayah hingga cabang, serta konsistensi kegiatan seperti Rakornas, rapat pleno DPW/DPC, audiensi dengan pemerintah daerah, dan kolaborasi dengan organisasi perempuan lain. Dukungan pemerintah terlihat jelas melalui keterlibatan langsung Bupati, Gubernur, dan lembaga daerah dalam kegiatan GWS.

Kehadiran GWS juga selaras dengan mandat kebijakan daerah, khususnya Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menekankan

peningkatan partisipasi ekonomi dan politik perempuan. Selarasnya arah gerakan dengan Asta Cita nomor 6 (pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan) turut memperkuat legitimasi politik dan moral GWS di arena pembangunan daerah.

Adapun dukungan masyarakat terbangun melalui partisipasi perempuan dalam kegiatan UMKM, koperasi, pelatihan, dan pendampingan lintas daerah. Aktivitas audiensi dan publikasi di media sosial memperluas basis dukungan serta membuka ruang interaksi antara perempuan dan aktor politik lokal. Dengan demikian, GWS memiliki authorizing environment yang relatif stabil dan inklusif.

## 2) Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber daya seperti anggaran, SDM dan teknologi, serta manajemen untuk mencapai tujuan kebangkitan perempuan dalam Gerakan Wanita Sejahtera Jawa Tengah. Kapasitas operasional GWS tercermin dari kemampuannya menggerakkan SDM perempuan, memanfaatkan jejaring kelembagaan, dan mengorganisasi kegiatan yang bersifat teknis maupun advokatif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa GWS berhasil menghasilkan pelatihan keterampilan usaha, pendampingan UMKM, pelatihan digital marketing, serta fasilitasi pemasaran melalui kegiatan-kegiatan strategis di berbagai kabupaten/kota.

Kolaborasi GWS dengan BKOW Jawa Tengah memperkuat kapasitas operasional karena menghadirkan dukungan program, modal sosial, serta akses terhadap kelompok perempuan miskin. Usulan "anggaran perempuan" kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa GWS tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi berupaya memperluas kapasitas melalui advokasi kebijakan yang bersifat struktural.

Pada tataran keorganisasian, GWS memiliki jaringan DPW dan DPC yang berjalan aktif. Ini menunjukkan kapasitas manajerial dan koordinatif yang baik, terutama dalam menyatukan agenda lintas daerah menjadi sebuah gerakan yang terkoordinasi. Dengan demikian, kapasitas operasional GWS dapat dinilai memadai untuk menghasilkan nilai publik, khususnya pada sektor ekonomi.

## 3) Nilai Publik

Nilai publik dapat dipahami sebagai manfaat yang dirasakan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Nilai publik GWS di Jawa Tengah terlihat paling kuat pada aspek pemberdayaan ekonomi perempuan. Program pelatihan usaha, peningkatan kualitas produk, pendampingan UMKM, serta perluasan akses pemasaran memberikan manfaat langsung pada peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Upaya ini juga mendukung tujuan pembangunan daerah dan memperkuat ekonomi keluarga, terutama di wilayah dengan jumlah perempuan pelaku UMKM yang besar.

Sementara itu, nilai publik pada aspek pemberdayaan politik tampak masih terbatas. Meski GWS aktif melakukan audiensi dan memperluas jaringan politik perempuan, tidak terdapat bukti empiris bahwa aktivitas tersebut telah meningkatkan representasi formal perempuan di parlemen. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPRD Jawa Tengah masih berada pada angka 17,65 persen. Artinya, GWS telah menghasilkan nilai proses berupa peningkatan akses, literasi politik, dan jejaring, tetapi belum menghasilkan nilai hasil berupa peningkatan keterwakilan politik perempuan. Dengan demikian, nilai publik GWS dalam ranah politik masih berada pada fase penguatan ekosistem partisipasi perempuan, belum pada pencapaian outcome politik yang signifikan.

## Simpulan dan Saran

Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) di Jawa Tengah telah membuktikan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, terutama melalui penguatan ekonomi UMKM perempuan, pelatihan digital, dan pendampingan komunitas. Analisis nilai kepublikan dari GWS lebih diraskan pada ranah

ekonomi, yaitu dalam peningkatan kemandirian dan kapasitas usaha perempuan. Sementara pada ranah politik, dampak representasional masih terbatas karena belum terlihat peningkatan signifikan jumlah perempuan di lembaga legislatif.

Dengan demikian saran yang direkomendasikan kepada GWS Jateng agar dapat memberikan manfaat publik yang lebih luas khususnya dalam bidang politik, diantaranya adalah 1) *GWS Jateng dapat meningkatkan program literasi politik dan pelatihan kader perempuan* dan 2) *GWS Jateng dapat membentuk kelompok advokasi lokal di setiap DPC sebagai inkubator untuk menyusun calon perempuan, memperkuat jaringan politik, dan memperluas basis dukungan pemilih perempuan.*

### Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga dan pihak yang telah memberikan dukungan data, informasi, dan fasilitas sehingga kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan tersebut berkontribusi penting dalam kelancaran proses penulisan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2025. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2024. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI%3D/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html?utm>
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From 'gender equality and 'women's empowerment' to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Engida, Y. M. (2021). The Three Dimensional Role of Education for Women Empowerment. *Journal of Social Sciences*, 17(1), 32–38. <https://doi.org/10.3844/jssp.2021.32.38>
- Fardianto, Fariz. 2023. Pemprov Jateng Diminta Tambah Anggaran untuk Program Perempuan. Diakses melalui <https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/pemprov-jateng-diminta-tambah-anggaran-untuk-program-perempuan-00-l4nr2-mf7cs8?utm>
- Fista Novianti. 2024. GWS Jateng Berdayakan Koperasi dan UMKM Perempuan. Edisi Minggu 1 September 2024. Diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/0413459414/gws-jateng-berdayakan-koperasi-dan-umkm-perempuan>
- Hidayat, Dwi Taufiq. 2025. Perempuan Bangkit, UMKM Sejahtera, Jawa Tengah Tersenyum. Diakses melalui <https://berlianmedia.com/perempuan-bangkit-umkm-sejahtera-jawa-tengah-tersenyum/?utm>
- Jateng Gayeng News. 2025. Organisasi Gerakan Wanita Sejahtera (GWS). Diakses melalui <https://jatenggayengnews.com/2025/02/organisasi-gerakan-wanita-sejahtera-gws/tentang-kami/>
- Junaedi. 2023. Bupati Semarang Ajak GWS Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan. Diakses melalui <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-semarang-ajak-gws-tingkatkan-pemberdayaan-perempuan/?utm>
- Lindgreen, A., Koenig-Lewis, N., Kitchener, M., Brewer, J. D., Moore, M. H., & Meynhardt, T. (2019). *Public value. Public value: Deepening, Enriching, and Broadening the Theory and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315163437>.
- Lindgreen, A., Koenig-Lewis, N., Kitchener, M., Brewer, J. D., Moore, M. H., & Meynhardt, T. (2019). *Public value. Public value: Deepening, Enriching, and Broadening the Theory and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315163437>.
- Moghadam, V. M., & Senftova, L. (2005). Measuring women's empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domains. *International Social Science Journal*, 57(184), 389–412. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2005.00557.x>

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2025. Berdayakan Perempuan, BKOW Jateng Fokus Tuntaskan 4 Isu Strategis. Diakses melalui <https://jatengprov.go.id/publik/berdayakan-perempuan-bkow-jateng-fokus-tuntaskan-4-isu-strategis/?utm>
- Sami, A., Jusoh, A., Nor, K. M., Irfan, A., & Qureshi, M. I. (2018). Systematic review of public value. *Journal of Public Value and Administration Insights*, 1(1), 1-6.
- Sami, A., Jusoh, A., Nor, K. M., Irfan, A., & Qureshi, M. I. (2018). Systematic review of public value. *Journal of Public Value and Administration Insights*, 1(1), 1-6.
- Sen, G., & Mukherjee, A. (2014). No Empowerment without Rights, No Rights without Politics: Gender-equality, MDGs and the post-2015 Development Agenda. *Journal of Human Development and Capabilities*, 15(2-3), 188-202. <https://doi.org/10.1080/19452829.2014.884057>
- Siti Islamiyah. 2022. DPC GWS Kabupaten Kudus Resmi Dilantik. Diakses melalui <https://www.zonanews.id/dpc-gws-kabupaten-kudus-resmi-dilantik/siti-islamiyah/>
- Wijers, G. D. M. (2019). Inequality regimes in Indonesian dairy cooperatives: understanding institutional barriers to gender equality. *Agriculture and Human Values*, 36(2), 167-181. <https://doi.org/10.1007/s10460-018-09908-9>
- Yuli, Surya. 2025. Gerakan Wanita Sejahtera Salatiga Turut Majukan UMKM dan Ekonomi Daerah. Diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/0416095810/gerakan-wanita-sejahtera-salatiga-turut-majukan-umkm-dan-ekonomi-daerah?utm>